

Kualitas Layanan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Publik di SMA Negeri 1 Percut Kecamatan Percut Sei Tuan

Aina Mulia Rizky¹, Amalia Apriliani², Bima Pandawa Sinurat³, Della Pebriani Simamora⁴, Trima Uasito Tampubolon⁵, Julia Ivanna⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: ainamuliaarizky24@gmail.com¹, amaliaapriliani20@gmail.com², bimasinurat847@gmail.com³, dellasimamora05@gmail.com⁴, trimauasitotampubolon@gmail.com⁵, juliaivanna@unimed.ac.id⁶

Article History:

Received: 06 April 2026

Revised: 26 Mei 2026

Accepted: 09 Juni 2026

Keywords:

Kualitas Layanan, Kebijakan Publik, Program Makan Bergizi Gratis, Kepuasan Siswa.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai wujud implementasi kebijakan publik di SMA Negeri 1 Percut Kecamatan Percut Sei Tuan serta untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa sebagai penerima manfaat program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian siswa kelas XII IPS 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, seperti kualitas rasa makanan yang tidak konsisten, porsi lauk yang kurang mencukupi, kebersihan makanan yang belum terjaga secara maksimal, serta distribusi makanan yang sering mengalami keterlambatan. Selain itu, variasi menu yang kurang beragam menyebabkan kejenuhan pada siswa. Dari segi kepuasan, sebagian siswa menilai program ini belum memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesehatan, meskipun cukup membantu dalam mengurangi rasa lapar saat kegiatan belajar berlangsung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek kualitas layanan, manajemen distribusi, serta pengawasan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan agar tujuan program dalam meningkatkan gizi dan kualitas pembelajaran siswa dapat tercapai secara optimal.

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan

nasional. Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan gizi yang baik sejak usia dini hingga usia sekolah. Gizi yang cukup tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, konsentrasi belajar, serta prestasi akademik siswa di sekolah. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang seimbang bagi peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung proses pendidikan dan pembangunan generasi masa depan (Badan Gizi Nasional, 2025).

Gizi merupakan salah satu faktor lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Asupan gizi yang cukup dan seimbang dapat membantu anak dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan serta mempengaruhi kemampuan belajar anak di sekolah. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah perlu menjadi perhatian berbagai pihak, baik keluarga, sekolah, maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik (Hartini, 2023). Pemenuhan gizi yang baik sejak usia sekolah diyakini dapat menjadi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah melalui kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Rozak & Izzah, 2025). Program ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan gizi seperti kekurangan gizi dan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan nasional.

Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dengan memberikan makanan bergizi kepada peserta didik di sekolah secara rutin dengan standar gizi tertentu. Melalui program ini diharapkan kebutuhan nutrisi siswa dapat terpenuhi sehingga mampu mendukung kesehatan serta meningkatkan konsentrasi belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, program ini juga memiliki tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif (Orbawati, dkk. 2025). Dengan demikian, program makan bergizi gratis tidak hanya berperan dalam meningkatkan status gizi siswa, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Program makan bergizi gratis juga dapat dipandang sebagai bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada peserta didik sebagai penerima manfaat program. Dalam perspektif kebijakan publik, kualitas layanan menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan suatu program pemerintah (Revida, 2021). Pelayanan yang berkualitas ditandai dengan adanya ketepatan sasaran program, keteraturan pelaksanaan program, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah perlu dikelola dengan baik agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi siswa sebagai penerima layanan.

Meskipun demikian, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan secara nyata kepada masyarakat (Kendi, 2024). Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kualitas layanan program menjadi hal yang penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan

secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks sekolah, kualitas layanan program makan bergizi gratis dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kualitas makanan yang diberikan, ketepatan waktu distribusi makanan, kebersihan dan keamanan makanan, serta kepuasan siswa sebagai penerima layanan. Apabila kualitas layanan program ini tidak berjalan dengan baik, maka tujuan utama dari kebijakan tersebut yaitu meningkatkan status gizi dan kualitas pembelajaran siswa tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana kualitas layanan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di sekolah sebagai bentuk implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah, kualitas layanan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar program dapat berjalan secara efektif. Kualitas layanan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mencakup aspek ketepatan waktu distribusi makanan, kebersihan dan keamanan makanan, serta kepuasan siswa sebagai penerima layanan. Apabila layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang diharapkan, maka tujuan program untuk meningkatkan status gizi serta mendukung proses pembelajaran siswa tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kualitas layanan program makan bergizi gratis dilaksanakan di sekolah sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 1 Percut Kecamatan Percut Sei Tuan, ditemukan berbagai tanggapan siswa yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam kualitas layanan program. Sebagian siswa menilai bahwa rasa dan kualitas makanan masih kurang baik, porsi makanan terutama lauk pauk belum mencukupi, serta kebersihan makanan dan peralatan yang digunakan belum sepenuhnya terjaga. Selain itu, proses distribusi makanan juga kerap mengalami keterlambatan sehingga siswa harus menunggu cukup lama. Variasi menu yang kurang beragam dan cenderung monoton juga menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan siswa sebagai penerima manfaat.

SMA Negeri 1 Percut Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu sekolah yang sudah mendapatkan program makan bergizi gratis bagi siswa. Pelaksanaan program tersebut tentu memerlukan pengelolaan dan pelayanan yang baik agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan program makan bergizi gratis yang sudah dilaksanakan di sekolah tersebut serta bagaimana program tersebut diimplementasikan dalam praktiknya di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kualitas Layanan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Publik di SMA Negeri 1 Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik. Kebijakan tersebut tidak hanya berupa keputusan, tetapi juga mencakup tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu (Koisin, 2023).

Selain itu, Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas serta dilaksanakan oleh aktor-aktor pemerintah yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan publik juga memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga setiap tindakan yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan publik yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya berfokus pada proses perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup tahap pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, program makan bergizi gratis dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi siswa serta mendukung proses belajar di sekolah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, khususnya dalam hal pemenuhan gizi yang berpengaruh terhadap kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Dengan demikian, keberadaan program makan bergizi gratis di sekolah menjadi bagian dari implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan bagi peserta didik.

B. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah (Maharaksa, dkk. 2025). Pada tahap ini, kebijakan yang telah dibuat mulai dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Tanpa adanya implementasi yang baik, suatu kebijakan hanya akan menjadi keputusan administratif yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk merealisasikan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, karena pada tahap ini berbagai program dan kegiatan mulai dijalankan oleh para pelaksana kebijakan di lapangan (Koisin, 2023).

Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar dapat dipahami dengan jelas. Sumber daya meliputi ketersediaan tenaga kerja, informasi, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi yang mengatur proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dapat dilihat dari bagaimana program makan bergizi gratis dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pelaksanaan program tersebut memerlukan komunikasi yang baik antara pemerintah, pihak sekolah, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, keberhasilan program juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana program, serta sistem organisasi yang mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah.

C. Program Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi serta kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah. Program ini dirancang untuk memberikan asupan makanan yang bergizi kepada siswa secara teratur sehingga dapat mendukung pertumbuhan fisik, kesehatan, serta kemampuan belajar mereka. Dengan adanya

program tersebut, diharapkan siswa memperoleh nutrisi yang cukup sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025: 3).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi pada anak usia sekolah. Pemenuhan gizi yang baik pada peserta didik sangat penting karena berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, daya tahan fisik, serta kemampuan konsentrasi dalam proses belajar. Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi di sekolah menjadi langkah strategis dalam membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan siswa.

Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, program makan bergizi gratis juga memiliki peran dalam membentuk kebiasaan pola makan sehat pada anak sejak usia dini. Melalui program tersebut, siswa tidak hanya mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya konsumsi makanan sehat bagi tubuh. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk implementasi kebijakan publik di SMA Negeri 1 Percut Kecamatan Percut Sei Tuan. Lokasi penelitian ditetapkan di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu penerima program MBG dan memiliki fenomena empiris terkait kualitas layanan program. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2026, melalui kegiatan observasi pada tanggal 12–13 Maret dan wawancara pada tanggal 14 Maret 2026. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 1 sebagai penerima langsung layanan program MBG.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi, untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan program MBG di sekolah.
2. Wawancara, untuk menggali informasi mendalam terkait pengalaman dan penilaian siswa terhadap kualitas layanan program.
3. Dokumentasi, sebagai data pendukung berupa foto, arsip, dan dokumen terkait pelaksanaan program.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang didukung dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator kualitas layanan dan kepuasan siswa.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data yang relevan.
2. Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, dengan menginterpretasikan makna data serta melakukan verifikasi

secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merujuk pada standar pelayanan keseluruhan mulai dari produksi hingga penyajian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya. Ini mencakup keamanan pangan, ketepatan waktu distribusi, higiene di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) sesuai pedoman Badan Gizi Nasional. Kualitas ini menjadi kunci keberhasilan program untuk menekan stunting dan meningkatkan SDM unggul. Aspek utama kualitas layanan meliputi pengawasan berlapis oleh Kemenkes, BPOM, dan dinas kesehatan daerah, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta inspeksi rutin. Pelayanan juga menekankan edukasi gizi, pemantauan status gizi peserta secara berkala, dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa seperti keracunan massal. Feedback dari penerima manfaat digunakan untuk evaluasi menu agar variatif dan diterima dengan baik.

Indikator kualitas layanan MBG diukur dari tingkat kepuasan, efektivitas nutrisi, dan minimnya keluhan seperti keterlambatan atau makanan tidak layak, dengan target peningkatan melalui pelatihan dan monitoring digital. Secara singkat, ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan makanan aman, bergizi, dan tepat sasaran di setiap tahap rantai pasok.

Adapun hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu mengenai frekuensi penerimaan layanan MBG di sekolah yaitu

Setiap hari sejak kelas XI semester 2, akan tetapi ada beberapa siswa yang mengatakan pernah mendapati pemagian MBG terpus atau tidak salurkan beberapa bulan ke sekolah dan selahnya di lanjut lagi pembagian MBG tersebut

Selanjutnya dari segi Rasa dan kualitas makanan hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu;

Siswa merasa rasa makannya enak di waktu tertentu, ada juga yang mengatakan yang disajikan biasa saja, dan mengatakan lebih enak makanan rumah atau masakan ibu mereka. Kadang makan MBG itu rasa dan kualitasnya kadang bagus, kadang jelek dan kadang lumayan. Selain itu beberapa siswa juga mengatakan rasa makanannya sangat buruk sekali

Selanjutnya dari segi kesesuaian porsi makanan, hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu;

Beberapa siswa mengatakan untuk porsi nasi sudah cukup, namun untuk lauk pauk belum cukup, selain itu beberapa siswa juga mengatakan lumayan cukup, masih kurang dan sangat tidak cukup

Selanjutnya dari segi kebersihan dan keamanan makanan, hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu;

Beberapa siswa mengatakan untuk tingkat kebersihannya bersih adajuga yang berpendapat kurang bersih, biasa saja dan tidak terlalu bersih

Selanjutnya dari segi ketertiban dan kelancaran pembagian, hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu;

Beberapa siswa mengatakan untuk tingkat proses pembagian makanan kadang tertib dan kadang sebaliknya dan tidak terlalu ada antrian dan kadang terlalu lama pengantaran makanan.

Selanjutnya dari segi kendala dalam pelayanan, hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu;

Beberapa siswa mengatakan untuk mereka pernah mengalami kendala salah satunya saat mau

menunya di kasih 2 biji nabati dengan harga Rp. 2000-an, sehingga itu di tolak sekolah kami, sehingga siswa tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu pendapat salah satu siswa mengatakan distribusi MBG kesekolah sangat lama, membuat saya dan teman saya harus menunggu berjam-jam menunggu lama MBG tidak enak. Dan ada juga siswa yang merasa tidak punya kendala.

Selanjutnya dari segi sikap petugas, hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu;

Untuk sikap petugas cukup baik untuk proses pegantaran dan pendistribusian MBG

Selanjutnya dari segi variasi dan daya tarik menu, hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu;

Beberapa siswa mengatakan untuk menu dalam 1 minggu itu pasti 3 kadang menunya sama, dan menurut siswa tersebut menu itu sangat membosankan. Selain itu menu yang di sajikan juga pasti telur, ikan, buahnya pasti pisang, klengkekeng dan anggur. Dan siswa juga mengatakan untuk menunya kurang marik dan dan bagi mereka untuk menu Rp. 10.000 per hari masih belum tercapai. Dan ada juga siswa mengatakan untuk menunya sangat membosankan.

Hasil wawancara dengan siswa SMA Negeri 1 Percut secara telanjang mengungkap kegagalan mendasar kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya jadi andalan pemerintah lawan stunting, tapi malah jadi ajang pemborosan anggaran. Frekuensi distribusi yang terputus-putus setiap hari sejak kelas XI tapi sering mangkir berbulan-bulan bukti implementasi lemah, di mana rantai pasok gagal dijaga, meninggalkan siswa kelaparan nutrisi tepat saat butuh energi belajar. Ini bukan sekadar keterlambatan logistik, melainkan pengkhianatan komitmen negara terhadap hak anak miskin atas makanan layak, seperti dijamin UU No. 18/2012 tentang Pangan. Lebih parah lagi, rasa dan kualitas makanan yang fluktuatif kadang enak, biasa, jelek, hingga "sangat buruk" kritik pedas terhadap standar higienis dan pengadaan bahan murahan yang tak layak Rp10.000 per hari. Siswa lebih pilih masakan ibu, artinya program ini gagal saingi nutrisi rumah tangga sederhana, sementara variasi menu monoton (telur, ikan, pisang, klengkekeng berulang) bikin bosan dan tak capai target gizi seimbang. Evaluasi kebijakan menunjukkan mismatch antara retorika "bergizi" dengan realita: ini implementasi setengah hati yang prioritaskan kuantitas daripada kualitas, berpotensi perburuk masalah kesehatan jangka panjang seperti obesitas atau malnutrisi terselubung.

Porsi yang "cukup untuk nasi, kurang lauk", kebersihan "kadang bersih kadang kotor", dan pembagian "kadang tertib kadang chaos dengan antrean lama" adalah bukti kegagalan manajemen operasional tingkat sekolah dan vendor. Kendala ekstrem seperti penolakan menu nabati Rp2.000 hingga siswa kosong tangan, atau nunggu berjam-jam, mencerminkan birokrasi kaku yang tolak inovasi murah meriah. Secara kritis, ini indikasi korupsi mikro atau inkompetensi pengawas, di mana dana publik bocor ke inefisiensi, melanggar prinsip akuntabilitas kebijakan publik dan hak asasi manusia atas pangan aman. Sikap petugas "cukup baik" tak cukup selamatkan program yang rusak dari akar: MBG bukan sukses, tapi kegagalan sistemik yang butuh audit forensik dan sanksi tegas terhadap pelaku. Evaluasi implementasi menuntut reformasi radikal desentralisasi menu lokal, monitoring real-time via app, dan sanksi vendor nakal kalau tidak, kebijakan ini cuma gimmick politik yang sia-siakan triliunan rupiah, tinggalkan generasi muda dengan perut kenyang tapi nutrisi kosong, dan hilangkan kepercayaan rakyat pada negara.

Hasil wawancara siswa SMA Negeri 1 Percut mengungkap ketidakstabilan frekuensi MBG yang seharusnya harian sejak kelas XI semester 2, namun sering terputus beberapa bulan, serta kualitas rasa makanan yang fluktuatif dari enak hingga sangat buruk dan kalah saing dengan masakan rumah. Menurut George C. Edwards III, variabel komunikasi kebijakan gagal karena siswa tidak menerima informasi konsisten tentang jadwal dan standar kualitas, sementara sumber

daya tidak memadai akibat variasi rasa serta porsi lauk pauk yang kurang meski nasi cukup. Hal ini menunjukkan disposisi pelaksana kurang optimal dalam menjaga konsistensi, sehingga program MBG gagal mencapai target gizi harian Rp10.000 dan justru menimbulkan ketidakpuasan yang menghambat efektivitas implementasi.

Kendala distribusi yang lambat berjam-jam, ketidaktertiban antrean, kebersihan makanan yang inkonsisten dari bersih hingga kurang bersih, serta variasi menu membosankan dengan pengulangan telur-ikan-buah tertentu, mencerminkan masalah struktural birokrasi dan lingkungan eksternal menurut teori Edwards III. Keterlambatan pengantaran serta penolakan menu nabati murah oleh sekolah menandakan komunikasi antarpihak lemah dan sumber daya rantai pasok tidak efisien, yang diperparah ketidakpastian keamanan pangan. Sikap petugas yang cukup baik menjadi poin positif pada disposisi pelaksana, namun tidak cukup mengimbangi ketidakancakan proses, sehingga kebijakan nasional MBG kehilangan legitimasi lokal akibat ketidaksesuaian dengan kondisi sekolah.

Secara keseluruhan, temuan wawancara ini mengilustrasikan kegagalan sinergi enam variabel Edwards III, di mana birokrasi kaku dan lingkungan sosial siswa yang mengeluhkan porsi serta daya tarik rendah menyebabkan program anti-stunting kurang efektif. Meski ada siswa tanpa kendala, dominasi keluhan menegaskan perlunya perbaikan komunikasi jelas, alokasi sumber daya berkualitas, dan disposisi proaktif untuk distribusi on-time. Tanpa reformasi ini, MBG berisiko hanya pengisi sementara bukan intervensi gizi berkelanjutan, dengan rekomendasi monitoring independen untuk selaraskan kebijakan pusat dengan realitas lapangan.

Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia memberikan kepuasan optimal kepada siswa dari PAUD hingga SMA, distribusi makanan harus konsisten setiap hari sekolah tanpa terputus, dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat kabupaten/kota dengan prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Sistem rantai pasok berbasis pangan lokal dan monitoring digital lintas kementerian seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kemendikbudristek, serta Kemenkes memastikan ketepatan waktu sebelum jam belajar, menghindari keterlambatan yang merusak kepercayaan siswa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, dirancang untuk menyediakan makanan bergizi setiap hari bagi siswa, terutama sejak kelas XI semester 2, guna mendukung kesehatan dan prestasi belajar.

Adapun hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu manfaat program penerimaan layanan MBG di sekolah yaitu ;

Beberapa siswa mengatakan manfaat program ini biasa saja, beberapa siswa juga mengatakan kalau untuk kesehatan tidak terlalu bermanfaat karena gizinya kurang. Untuk kegiatan belajar pasti bermanfaat, karena MBG dibagi pada saat jam istirahat atau jam makan siang, membuat siswa tidak kelaparan di jam mata pelajaran selanjutnya.

Adapun hasil wawancara yang kami lakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Percut yaitu saran dan harapan siswa terhadap layanan MBG di sekolah yaitu ;

Beberapa siswa mengatakan MBG tersebut kedalam bentuk uang saja, supaya bisa membeli makanan yang lebih membuat siswa kenyang. Selain itu siswa juga mengatakan dana MBG jangan di korupsi dan pada saat distribusi jangan lama atau lelet harus ontime . dan ada juga siswa mengatakan tidak ada saran untuk perbaikan MBG.

Hasil wawancara dengan siswa SMA Negeri 1 Percut mengungkap manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbatas, di mana sebagian siswa menilai program ini hanya "biasa saja" dengan kontribusi gizi minim sehingga kurang efektif untuk kesehatan jangka panjang,

meskipun mendukung fokus belajar dengan mencegah kelaparan saat pelajaran berikutnya. Menurut George C. Edwards III dalam teori implementasi kebijakan, efektivitas program bergantung pada enam variabel, di mana aspek komunikasi dan sumber daya tampak bermasalah karena kandungan nutrisi makanan MBG tidak memenuhi standar gizi yang dijanjikan, sehingga gagal mencapai tujuan utama anti-stunting sebagai intervensi kesehatan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara output program (pembagian makanan saat istirahat) dengan outcome yang diharapkan, yakni peningkatan kualitas gizi siswa, di mana disposisi pelaksana dan birokrasi mungkin tidak mendukung kualitas bahan makanan yang optimal.

Saran siswa yang mendominasi wawancara, seperti konversi MBG menjadi uang tunai untuk fleksibilitas pilihan makanan, distribusi on-time, dan pencegahan korupsi, mencerminkan ketidakpuasan struktural terhadap pelaksanaan program di tingkat lokal. Edwards III menekankan bahwa struktur birokrasi dan disposisi pelaksana menjadi kunci, di mana keterlambatan distribusi ("lelet") mengindikasikan manajemen rantai pasok yang lemah serta potensi korupsi yang merusak kepercayaan publik terhadap legitimasi kebijakan. Usul bentuk uang tunai menyoroti kebutuhan fleksibilitas lokal yang diabaikan oleh kebijakan kaku nasional, meskipun berisiko salah sasaran, sehingga menegaskan bahwa tanpa penyesuaian kondisi ekonomi sosial siswa (seperti preferensi kenyang daripada gizi optimal), program ini rentan terhadap resistensi dan rendahnya tingkat pemanfaatan efektif.

Secara keseluruhan, temuan wawancara ini mengilustrasikan kegagalan implementasi MBG akibat ketidakseimbangan variabel Edwards III, khususnya komunikasi yang ambigu tentang manfaat gizi dan sumber daya yang tidak memadai untuk distribusi tepat waktu, yang menyebabkan siswa pasrah tanpa saran perbaikan sebagai bentuk resignasi. Teori Edwards menegaskan bahwa kebijakan publik sukses hanya jika semua elemen komunikasi jelas, sumber daya cukup, disposisi pelaksana proaktif, karakter birokrasi efisien, dan lingkungan eksternal mendukung bersinergi, sementara MBG di SMA Negeri 1 Percut justru menimbulkan ketidakpuasan karena prioritas pengisi perut mengalahkan tujuan strategis anti-stunting. Rekomendasi implisit adalah reformasi melalui peningkatan monitoring independen dan fleksibilitas lokal untuk mengoptimalkan outcome sosial program nasional ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai wujud implementasi kebijakan publik di SMA Negeri 1 Percut Kecamatan Percut Sei Tuan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek kualitas layanan yang masih memiliki banyak kekurangan, seperti kualitas rasa makanan yang tidak konsisten, porsi lauk yang belum mencukupi, kebersihan makanan yang belum terjaga secara maksimal, serta proses distribusi yang sering mengalami keterlambatan. Selain itu, variasi menu yang kurang beragam juga menimbulkan kejenuhan bagi siswa.

Dari segi implementasi kebijakan publik, program MBG di sekolah tersebut belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan implementasi, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan manajemen pelaksanaan. Ketidakteraturan distribusi serta kualitas layanan yang fluktuatif menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak terkait masih belum berjalan secara efektif. Sementara itu, dari sisi kepuasan siswa, program MBG dinilai belum memberikan manfaat yang optimal terhadap pemenuhan gizi siswa, meskipun cukup membantu dalam mengurangi rasa lapar saat kegiatan belajar berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 1 Percut Kecamatan Percut Sei Tuan masih memerlukan perbaikan yang menyeluruh, baik dari segi kualitas layanan, pengelolaan distribusi, maupun pengawasan pelaksanaan program agar tujuan kebijakan dalam meningkatkan gizi dan kualitas pembelajaran siswa dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Cenderawasih, U., Makan, P., Gratis, B., & Kunci, K. (2025). *DAMPAK JANGKA PANJANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN THE LONG-TERM IMPACT OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM ON HEALTH AND EDUCATIONAL SUSTAINABILITY*. 5(2), 130–137.
- Hartini, D. A., Solikhah, L. S., Mulyo, G. P. E., Lestari, D., Hayudanti, D., Kaluku, K., Aiman, U., Budiman, F. A., Dwiyan, P., Wahyuningsih, R., Ethasari, R. K., Fitria, Juhartini, Lestari, V., Lestari, D. I., & Saleky, Y. W. (2023). *GIZI DALAM DAUR KEHIDUPAN* (H. Akbar (ed.)). (CV. MEDIA SAINS INDONESIA).
- Kendi, I. K. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. MANGGU MAK MUR TANJUNG LESTARI.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Az, S., & Kania, Z. (2025). Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus Model dan Pendekatan Implementasi kebijakan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 69–73.
- Maulia, S. P., Sahra, L. P., Fitriani, A., & Kurnia, R. (2025). *Dampak Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Kualitas Pembelajaran Siswa*. 9(6), 1850–1855.
- Ngabidin, M., Yuswanto, D. T., Yayuk, Ayu, A., Nastiyawati, ., Huroiyati, A., Purbasari, Sanubari, Fenti, A., & Maulida Zulfa. (2025). *Buku Saku Panduan Edukasi Gizi dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar*.
- Orbawati, E. B., Mukti, A., Aufa, R., Karunia, I., & Ikhtiar, S. (2025). *Policy to Practice Gap dalam Program Makan Bergizi Gratis : Studi SWOT di Magelang*. 10(4), 797–810.
- Pakpahan, A. F., Prasetyo, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., Sipayung, P. D., Sesilia, A. P., Rahayu, P. P., Purba, B., Chaerul, M., Yuniwati, I., Siagian, V., & Rantung, G. A. J. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*.
- Rachman, A. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d* (Issue January).
- Rahmadi. (2011). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Antasari Press.
- Rahmani, & Rizqi, M. (2020). *Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada badan publik sektor sumber daya alam di provinsi kalimantan timur*. 8(2), 85–94.
- Revida, E., Aisyah, S., Pardede, A. F., Purba, S., A. Nururrochman Hidayatulloh, N. V. L., SN, A., Kato, I., Silalahi, M., & Manullang, S. O. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik* (A. Karim & J. Simarmata (eds.); Edisi Pertama). Yayasan Kita Menulis.
- Rozak, A., Izzah, A. N. L., & Chusna, C. A. (2025). *Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Konsentrasi Siswa Kelas III Sekolah Dasar*. 9(5), 1603–1612.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metode Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Wahyudi, A., Hodriani, Siregar, M. F., Jamaludin, Yunita, S., Siagian, L., Nababan, R., & Prayetno. (2022). *RAMBU-RAMBU MENULIS ILMIAH RAMBU-RAMBU MENULIS ILMIAH Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Waruwu, & Marinu. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. 7, 2896–

2910.

Yohanes, P., Arwimbar, I., & Rahmadani, U. (2026). *ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PROGRAM MBG PADA PENDIDIKAN SD , SMP DAN SMA NEGERI DI KOTA JAYAPURA*. 10, 1179–1184.